

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR NEGARA (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah)

Bambang Jatmiko^{1*}

Ilham Gilar Wicaksono²

¹²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Korespondensi : bambang_jatmiko65@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to test and prove empirically the existence of correlations between variables of regional taxes, population, economic growth and regional expenditure. The problem in regional revenue (PAD) in Banjarnegara District which is not in accordance with the target set even the income is less than the target set in the previous year. The subject of this study is the Regional Financial and Asset Revenue Management Agency (BPPKAD) of Kabupaten Banjarnegara with an object of financial statements containing regional income, regional expenditure, regional tax, and gross regional domestic income (GRDP). In addition, researchers also use data on the number of population included in the productive age category, the data obtained through the official web of the Central Statistics Agency (BPS) of Banjarnegara Regency. This study uses qualitative methods with secondary data retrieval. Sampling in this study using purposive sampling. The analiss method used in this research is descriptive study. The application to process data in this study uses SPSS v.15.0. The research model used is multiple correlation, where the test aims to find correlations or relationships between two or more variables. Furthermore, the researchers also used the value for money (VFM) method to analyze the PAD owned by the Banjarnegara Regency government. The value for money method has three criteria, namely, efficient, effective and economical (3E).

Keywords: *Regional Original Revenue, Regional Tax, Regional Expenditures, Population*

Submission date : 2019-09-26

Acceptance date : 2019-09-30

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah

pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali sedalam-dalamnya potensi kekayaan daerah untuk meningkatkan otonomi daerah. Beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang pengertian PAD antara lain, Warsito (2001:128), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari daerah yang di pungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Rahman (2005:38), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jumlah penduduk juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana jumlah penduduk naik maka pajak ikut naik. Dalam kaitan pembangunan daerah dapat dikaitkan dengan penambahan industri di daerah tersebut. Wong (2004), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak positif terhadap kenaikan pajak daerah, karena semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004), menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratolo dan Binang (2012), mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro rakyat (Horota, Ida, dan Purba. 2017). Jika dilihat dari segi pajak, pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, karena semakin tinggi jumlah penduduk maka wajib pajak juga semakin tinggi mulai dari pajak pribadi, pajak penghasilan, pajak bangunan dan bumi (Devita, Arman dan Junaidi. 2014). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratolo dan Binang (2012), menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Nurzen dan Ikhsan (2016), mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi (2007), menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Rudy (2010), mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak	Retribusi	Pengelolaan Kekayaan	Pendapatan Lain yang Sah
2013	12.411.000	23.750.537	4.543.000	35.813.875
2014	27.770.000	26.090.137	6.582.563	43.059.650
2015	35.002.500	25.644.620	8.185.350	73.795.731
2016	39.217.500	28.167.341	27.359.670	99.379.963
2017	42.287.500	29.802.039	10.017.080	89.812.987

*dalam ribuan, dalam rupiah

Sumber: <https://banjarnegarakab.bps.go.id>

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi pada tahun 2016. Data tersebut didapatkan dari DPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun adalah sektor pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi, yang mana metode ini mencari keterkaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penggunaan metode korelasi teknik analisis menggunakan analisis kualitatif atau statistik, kemudian untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel menggunakan perhitungan koefisien korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel (Faenkel dan Wallen, 2008:328). Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara jumlah penduduk dengan pajak daerah dalam kaitannya meningkatkan PAD; (2). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya meningkatkan PAD; (3). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya meningkatkan PAD; (4). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara pajak daerah dengan belanja daerah dalam kaitannya meningkatkan PAD; (5). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya meningkatkan PAD; (6). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah dalam kaitannya meningkatkan PAD.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori stewardship bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manager dalam perusahaan sebagai pelayan (steward) dapat

termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan public dan umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. Dalam artian lain pemerintah ada karena masyarakat, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya masyarakat. Masyarakat di sini dapat dikatakan sebagai raja, karena pada hakekatnya pemerintah memang mengatur masyarakat sesuai peraturan yang telah sah, namun masyarakat juga berhak menerima pelayanan dari pemerintah. Kaitannya dengan pendapatan asli daerah adalah dimana masyarakat itu dapat makmur dari segi infrastruktur maupun pendidikan yang dapat bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tidak lain juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat membayarkan bagian dari hasilnya kepada pemerintah. Namun masyarakat di dalam membayarkan pajak kepada pemerintah tidak akan menerima timbal balik. Karena pajak adalah kewajiban setiap individu untuk membayarkan sebagian hasil dari kekayaan kepada pemerintah. Kaitannya dalam penelitian ini adalah dimana pemerintahan dapat melayani masyarakatnya dengan baik. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan dana yang di dapatkan melalui bantuan dari pemerintah pusat dan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Salah satunya dengan mengembangkan potensial daerah tersebut dengan melibatkan masyarakatnya. Aliran Malthusian, aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul “*Essai on Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*”, menyatakan bahwa penduduk akan berkembang biak dengan pesat dan tidak terkontrol apabila tidak ada pembatasan, dan akan memenuhi bumi ini. Jumlah penduduk bagi pandangan pemerintah berupa asset pembangunan namun sekaligus juga beban pembangunan. Dalam teori lain mengatakan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : (1) kelahiran, (2) kematian, (3) migrasi masuk, (4) migrasi keluar (Subri, 2003 : 16). Dari keempat komponen tersebut di Indonesia telah terjadi ledakan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain : a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah; d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah; e. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, di antaranya menurut Smith (1776) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu: a). Pertumbuhan output total; (b). Pertumbuhan Penduduk. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow membagi proses pertumbuhan menjadi lima tahap (Mudrajad:2003), yaitu: Perekonomian Tradisional, Pra Kondisi

Tinggal Landas, Tinggal landas. Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi: (a). belanja administrasi dan umum; (b). Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik; (c). Belanja modal; (d). Belanja transfer.

Jumlah Penduduk Dengan Pajak Daerah.

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Kerangka teori hukum, menempatkan fungsi Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi (Philipus, 1995: 28). Jumlah penduduk berperan dalam peningkatan penghasilan pajak, karena jumlah wajib pajak ikut naik seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Yazid (2014) mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari, Vecky, dan Mauna (2016) didapatkan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Enjelina (2016), mendapatkan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₁: terdapat korelasi antara jumlah penduduk dengan pajak daerah..

Jumlah Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita. Dengan pertumbuhan perkapita, berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006). Adam Smith (dalam Arsyad, 2010), mengungkapkan unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu: pertama, sumberdaya alam yang tersedia, kedua, sumberdaya manusia dan ketiga, akumulasi modal yang harus dimiliki. Namun Smith lebih menekankan pada stok modal yang merupakan unsur yang secara aktif menentukan tingkat output. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk dilain pihak (Boediono, 1992). Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sementara itu untuk mengelola sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia. Keduanya saling berkaitan, untuk mengelola sumber daya alam dibutuhkan sumber daya manusia sedangkan jika tidak ada sumber daya alam maka manusia tidak bisa berbuat

apa-apa. Penelitian Rochaida (2016), menjelaskan jumlah penduduk dalam peningkatan ekonomi berperan penting untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting lainnya dalam pembangunan, karena selain sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi namun berikutnya juga dapat digunakan sebagai ukuran dalam mencapai kesejahteraan. Banyak teori dan kerangka empiris telah membuktikan bahwa tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output (produksi), namun juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah (Wahyuningsih, 2009). Menurut Siregar dan Dwi (2008), pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmattullah (2015), menyatakan jika jumlah penduduk naik maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hal ini harap diantisipasi oleh pemerintah karena pertumbuhan penduduk juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak diiringi oleh lapangan pekerjaan yang memadai. Dari uraian tersebut dapat di tarik hipotesis:
H₂: terdapat korelasi antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah Penduduk Dengan Belanja Daerah.

Jumlah penduduk yang tinggi dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap belanja modal. Jumlah penduduk bagi pemerintah daerah di pandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Belanja daerah dapat meningkatkan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat maupun wisatawan. Pelayanan kepada masyarakat harus optimal karena kepuasan masyarakat adalah tujuan pemerintah daerah. Pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh tiga hal yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Devita, Arman, dan Junaidi (2014), mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk dapat mengurangi peningkatan belanja langsung. Namun berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki pengaruh positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irdha, Vecky dan Daisy (2010), mendapatkan hasil jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam artian lain jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sasana (2011), memperoleh hasil jumlah penduduk memiliki hubungan dengan belanja daerah dan berpengaruh positif. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₃: terdapat korelasi antara jumlah penduduk dengan belanja daerah

Pajak Daerah Dengan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangannya harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah terdapat pada sektor pajak. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Sianturi (2010), menyatakan terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Belanja modal termasuk dalam belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Valencia dan Nur (2015), mendapatkan hasil pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Syukriy, dan Heru

(2015), yang mendapatkan hasil bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dikhususkannya belanja modal. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Syukriy (2016), mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₄: terdapat korelasi antara pajak daerah dengan belanja daerah.

Pajak Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Sulastyawati (2014), pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Sebagai fungsi anggaran, pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia (Nur, 2014). Stabilitasnya ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari sektor perpajakannya, meskipun sektor perpajakan bukan satu-satunya indikator yang menentukan kestabilan perekonomian di suatu negara. Pajak merupakan salah satu faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa harus bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan). Menurut Chaudhuri (1989), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam konsep yang nyata dari output barang dan jasa yang bertahan selama periode waktu yang panjang, diukur dalam konsep nilai tambah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desislava (2016), mendapatkan hasil pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan I Made (2016), menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hotman, dan Heatubun (2013), menyatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari uraian tersebut maka ditarik hipotesis

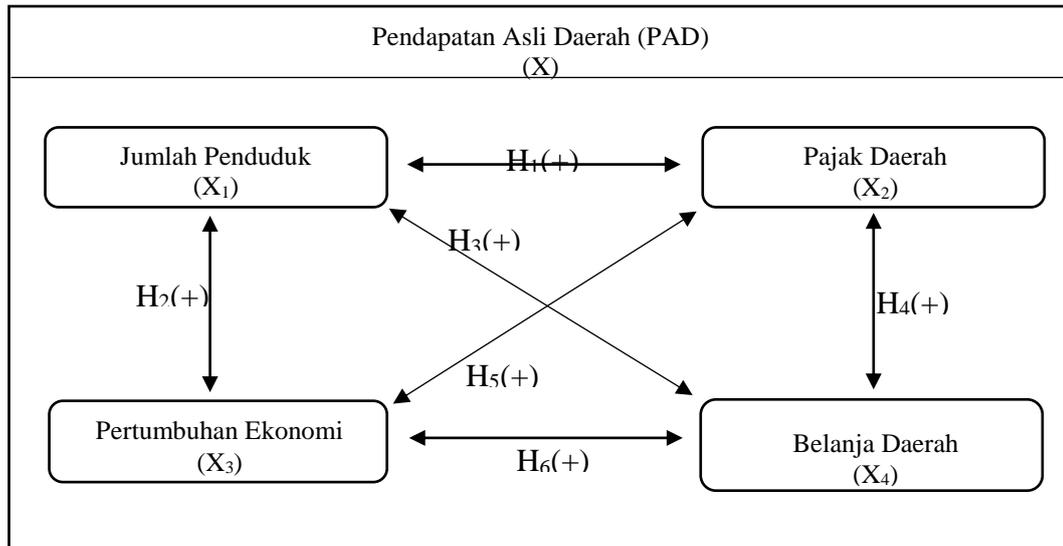
H₅: terdapat korelasi antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya menjaga kestabilan ekonomi untuk masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mencerminkan kemakmuran daerah tersebut. Kuncoro (2004), menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikaitkan oleh sarana dalam sektor wisata, jadi wisatawan yang datang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pajak dan retribusi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adi (2007), menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja daerah. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurzen dan Ikhsan (2016), mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Abdullah (2013) mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Belanja daerah yang dimaksudkan disini dapat berupa belanja untuk pembangunan infrastruktur dan industri (badan usaha milik pemerintah). Dengan demikian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₆: terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah.

Adapun Model Penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banjarnegara, dengan data yang dibutuhkan seperti Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga mencakup kondisi geografis yang khususnya jumlah penduduk yang bekerja, berwirausaha, pendidikan maupun pengangguran. Menurut Sekaran (2011), data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Sedangkan data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto, 1994 : 420). Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa objek yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah dengan jumlah sampel 5 tahun data sekunder dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto, 1994 :43). Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan salah satu dari beberapa jenis teknik sampling. Purposive sampling adalah tektik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti hanya mengambil data yang di perlukan untuk penelitian ini dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: (a). Jumlah Pajak Daerah; (b). Jumlah Penduduk Usia Produktif; (c). Pertumbuhan Ekonomi; (d). Belanja Daerah. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

data sekunder yang mana data didapatkan dari web pemerintahan Kabupaten. Adapun operasionalisasi variabel: Jumlah penduduk, Pajak Daerah, Pertumbuhan ekonomi, Belanja Daerah. Analisis korelasi berganda bertujuan untuk menguji kuat atau lemahnya hubungan antar variabel jumlah penduduk, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja daerah. Rumus dari korelasi berganda sebagai berikut:

$$R_{Y.X_1X_2} = \frac{b_1\sum X_1X + b_2\sum X_2X + b_3\sum X_3X + b_4\sum X_4X + e}{\sum X^2}$$

Keterangan:

- R = Koefisien korelasi berganda
- X1 = Jumlah penduduk
- X2 = Pajak daerah
- X3 = Pertumbuhan ekonomi daerah
- X4 = Belanja daerah
- X² = Pendapatan asli daerah
- n = Banyaknya sampel

Kuat atau lemahnya hubungan antara keempat variabel dapat dilihat dari beberapa kategori koefisien korelasi mempunyai nilai $0 \leq R \leq 1$ dimana:

- a. Apabila $R=1$, maka korelasi antara ketiga variabel dikatakan sempurna; dan
 - b. Apabila $R=0$, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.
1. Ketentuan Uji Korelasi Berganda sebagai berikut:
 - a. Dasar Pengambilan Keputusan
 - b. Jika nilai sig f change $< 0,05$ maka berkorelasi
 - c. Jika nilai sig f change $> 0,05$ maka tidak berkorelasi
 2. Pedoman Derajat Hubungan
 - a. Nilai R 0,00 s/d 0,20 maka tidak ada korelasi
 - b. Nilai R 0,21 s/d 0,40 maka korelasi lemah
 - c. Nilai R 0,41 s/d 0,60 maka korelasi sedang
 - d. Nilai R 0,61 s/d 0,80 maka korelasi kuat
 - e. Nilai R 0,81 s/d 1,00 maka korelasi sempurna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji korelasi berganda bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris adanya korelasi antara 2 variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu jumlah penduduk, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah. Berikut uji korelasi yang tersaji pada tabel 2:

Tabel 2
Uji Korelasi

		Jumlah Penduduk (X1)	Pajak Daerah (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (X3)	Belanja Daerah (X4)
Jumlah	Pearson Correlation	1	.781	.957*	.938*
Penduduk	Sig. (2-tailed)		.119	.011	.019
(X1)	N	5	5	5	5
Pajak	Pearson Correlation	.781	1	.911*	.905*
Daerah	Sig. (2-tailed)	.119		.031	.035
(X2)	N	5	5	5	5
Pertumbu	Pearson Correlation	.957*	.911*	1	.992**
han	Sig. (2-tailed)	.011	.031		.001
Ekonomi	N	5	5	5	5
(X3)					
Belanja	Pearson Correlation	.938*	.905*	.992**	1
Daerah	Sig. (2-tailed)	.019	.035	.001	
(X4)	N	5	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output Spss v.15.0

Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Pajak Daerah

Hasil hipotesis pertama (H_1), dengan melihat tabel 2 di atas, diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak berkorelasi dengan pajak daerah dengan nilai *sig* (2-tailed) $0.119 > \alpha 0.05$. Artinya jumlah penduduk dengan pajak daerah tidak terdapat korelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih, Utama, dan Wirathi (2011) yang mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi pajak daerah jika penduduk itu tidak tahu akan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Yazid (2014), begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Vecky, dan Mauna (2016), dan Enjelina (2016) yang mendapatkan hasil signifikan positif. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk tenaga maupun pikirannya. Dalam kaitannya dengan pajak daerah, jumlah penduduk umur produktif yang sudah bekerja maupun berwirausaha sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Pajak yang dapat dipungut melalui jumlah penduduk berupa pajak penghasilan bagi yang sudah memiliki pekerjaan atau wirausaha. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kabupaten Banjarnegara masih kurang paham akan pentingnya membayarkan pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian juga pajak tidak hanya di pengaruhi oleh sumberdaya manusia akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penghasilan pajak daerah. Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa masih banyak warga masyarakatnya yang tidak membayar pajak. Pajak yang tertinggi tidak terbayarkan adalah pajak kendaraan bermotor.

Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2), dengan melihat tabel 2 di atas diketahui bahwa variabel jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif, dengan nilai *sig (2-tailed)* sebesar $0.011 < \alpha 0.05$. Penelitian ini sejalan dengan Rochaida (2016), yang mendapatkan hasil jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi signifikan positif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Dwi (2008), yang mendapatkan hasil signifikan positif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmattullah (2015) juga mendapatkan hasil signifikan positif antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam segi positif yang ditimbulkan, namun juga ada dampak negatif yang ditimbulkan jika pemerintah tidak mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang sewaktu-waktu dapat melonjak. Dampak positif dari jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam jumlah lapangan pekerjaan yang mulai diisi oleh masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan merupakan bertambahnya jumlah pengangguran dikarenakan tidak bertambahnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Hasil dari wawancara terhadap Pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), 4. Tingkat inflasi dan 5. Tingkat suku bunga. Dengan tingginya jumlah penduduk yang dapat dikatakan sebagai sumberdaya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara banyak yang memiliki usaha sendiri. Selain itu potensi alam di Banjarnegara juga cukup baik, salah satunya yang terkenal Dieng, objek wisata tersebut terbagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Wonosobo dan Banjarnegara.

Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3), dengan melihat tabel 2 di atas, mendapatkan hasil variabel jumlah penduduk dengan belanja daerah memiliki korelasi signifikan positif dengan nilai *sig (2-tailed)* $0.019 < \alpha 0.05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devita, Arman dan Junaidi (2014), mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk dapat mengurangi peningkatan belanja langsung. Namun berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki pengaruh positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak berpengaruh, yang pada intinya variabel jumlah penduduk dengan belanja daerah memiliki korelasi signifikan positif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irdha, Vecky dan Daisy (2010), juga mendapatkan hasil jumlah penduduk dengan belanja daerah memiliki korelasi signifikan positif yang artinya jumlah penduduk dengan belanja daerah memiliki korelasi. Demikian juga dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sasana (2011) menyatakan bahwa jumlah penduduk berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi belanja daerah dalam kaitannya pembenahan fasilitas penunjang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka pemerintah daerah juga akan mengeluarkan dana yang bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pengeluaran pemerintah disini dapat dikategorikan dalam belanja daerah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan BPPKAD dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa semakin

tingginya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya pembenahan infrastruktur untuk melayani warga.

Korelasi Antara Pajak Daerah Dengan Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang dapat dilihat pada tabel 2 mendapatkan hasil nilai *sig* (*2-tailed*) sebesar $0.035 < \alpha 0.05$ yang memiliki arti bahwa pajak daerah memiliki korelasi signifikan positif dengan belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Syukriy (2016) yang mendapatkan hasil pajak daerah memiliki korelasi signifikan positif terhadap belanja daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Valencia dan Nur (2015), mendapatkan hasil pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Syukriy, dan Heru (2015), yang mendapatkan hasil bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dikhususkannya belanja modal. Dengan hasil pengujian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pajak daerah berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah. Hal tersebut dapat dikarenakan dengan meningkatnya pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga dapat meningkatkan belanja daerah dalam pemanfaatan kepentingan publik. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa pajak daerah dapat juga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pajak yang diterima oleh pemerintah menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut juga naik.

Korelasi Antara Pajak Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) yang dapat dilihat pada tabel 2 diatas mendapatkan hasil pengujian dengan nilai *sig* (*2-tailed*) sebesar $0.031 < \alpha 0.05$ yang memiliki arti bahwa variabel pajak daerah memiliki korelasi signifikan positif dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pajak daerah dapat meningkatkan indikasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indikasi pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat melalui kemajuan, kemandirian dan kemakmuran masyarakat dalam daerah tersebut. Selanjutnya dengan melihat kemakmuran dan kemandirian daerah tersebut tidak terlepas dari besarnya pendapatan pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desislava (2016), mendapatkan hasil pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan I Made (2016), menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Hotman dan Heatubun (2013), menyatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau menyatakan dengan tingginya pendapatan pajak terutama dalam pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis keenam (H_6) yang dapat dilihat pada tabel 2 diatas, mendapatkan hasil nilai *sig* (*2-tailed*) $0.001 < \alpha 0.05$ yang berarti terdapat korelasi signifikan positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Adi

(2007) yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja daerah dikarenakan peningkatan pertumbuhan ekonomi bergantung pada besarnya belanja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitiannya tersebut mengatakan bahwa pengeluaran belanja daerah diperuntukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kaitannya pembenahan atau penambahan lahan usaha yang didirikan oleh masyarakat dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurzen dan Ikhsan (2016) mendapatkan hasil signifikan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah. Dalam penelitian tersebut dikatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dengan belanja daerah, lebih signifikannya pada belanja modal. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Mawarni dan Abdullah (2013) juga mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. Pimpinan BPPKAD menyatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap belanja daerah. Belanja daerah tetap dilakukan walaupun pertumbuhan ekonomi sedang turun, namun beliau mengatakan jika pertumbuhan ekonomi sedang baik maka belanja daerah dapat dioptimalkan dengan catatan tidak terlalu banyak pengeluaran pada tahun yang bersangkutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai korelasi antar variabel jumlah penduduk, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Selain itu juga untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara menggunakan metode *value for money (VFM)* yang mana PAD tersebut memenuhi syarat dari metode tersebut, yaitu: ekonomis, efisien dan efektif dalam penerimaan maupun pengeluaran PAD. Berdasarkan uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil dari 6 hipotesis terdapat satu hipotesis yang ditolak dan lima hipotesis diterima. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk tidak berkorelasi dengan pajak daerah yang berarti dengan tingginya jumlah penduduk tidak selalu meningkatkan pajak daerah.
2. Jumlah penduduk berkorelasi positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang artinya dengan tingginya jumlah penduduk dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Jumlah penduduk berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk dalam Kabupaten ini maka belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan meningkat.
4. Pajak daerah berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang berarti semakin tingginya pajak yang diperoleh pemerintah daerah dapat untuk meningkatkan anggaran belanja daerah.
5. Pajak daerah berkorelasi signifikan positif dengan pertumbuhan ekonomi yang berarti semakin tinggi pajak yang diperoleh pemerintah daerah dapat menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut sedang baik.
6. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang berarti semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga melakukan belanja daerah dengan anggaran lebih untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dampak dari segi ekonomi untuk Kabupaten Banjarnegara dapat berupa peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara menambah BUMDes, UMKM, dan potensi alam yang dapat dijadikan tempat wisata. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk kepentingan pemerintahan atau masyarakat umum. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara dapat meningkat dengan signifikan.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial yang dapat ditimbulkan yaitu dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan cara membuat BUMDes yang modal berasal dari pemerintah lalu dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya BUMDes masyarakat pun dapat merasakan hasilnya.

3. Dampak Lingkungan

Dampak implikasi segi lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu:

a. Lingkungan Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat akan terdampak berkurangnya pengeluaran untuk membantu pembenahan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah pusat dapat berkonsentrasi kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan.

b. Lingkungan Pemerintah Daerah

Didalam lingkup pemerintah daerah peningkatan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan atau memajukan daerah tersebut. selain itu juga dapat menambah fasilitas umum yang sekiranya belum mencukupi atau memadahi untuk pegawai pemerintahan ataupun masyarakat umum.

c. Lingkungan Masyarakat Umum

Masyarakat umum dapat merasakan peningkatan pendapatan asli daerah dalam hal meningkatnya lapangan pekerjaan, fasilitas umum yang memadahi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah ataupun perangkat desa dalam Kabupaten Banjarnegara. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah berdampak pula terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi P. H., 2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). *Jurnal Akuntansi Dan Sektor Publik* 08 (01), 1450-1465, Februari 2007
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiah, Nur, N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Predana Media Group.
- Apriana D., & Suryanto, R., 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan

- Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali). *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Arianto P. S., 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1).
- Ariasih. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE Universitas Gajah Mada.
- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2*. BPFE : Yogyakarta.
- Brata A. G., 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Chaundhuri, Primit. 1989. "The Economic Theory of Growth." Harvester Wheatsheaf.
- Daniri, M. A., 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Davey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Desislava, Stoilova. 2016. Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administración*, 62(3), 1041-1057.
- Devita A., Delis, A., & Junaidi, J., 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Dina, A., & Suryanto, R., 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(1), 68-79.
- Djarwanto, 1994. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Donaldson, L & Davis J.H., 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 17, 49.
- Enjelina, Meivira. 2016. Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Fraenkel, J.R dan Wellen, N.E., 2008. *How to Design and Evaluate research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Gunawan, A., & Sukartha, I. M., 2016. Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2036-2060.
- Hadjon, P. M., 1990, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1995, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim A., 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*, Salemba empat, Jakarta.
- Handayani, Putri HS, Syukriy Abdullah, Heru Fahlevi. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja

- Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Horota, P., Ida, A., & Purba, R., 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Hotman J., Heatubun Adolf B., 2013. Analisis Dampak Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah). Repository Universitas Terbuka.
- Irdha Gorahe, Masinambow, V., & Engka, D., 2010. Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Jatmiko, B., 2014. *Key Success Factors of Local Revenue Toward City And District Government Performance In Yogyakarta*. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
- Lestari, Siska, Vecky A.J Masinambow dan Mauna Th. B Maramis., 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 02 Tahun 2016. Hal. 306-314*.
- Mardiasmo. 2002. Dalam Buku Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Dalam Buku Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Cetakan Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi* ISSN, 2302, 0164.
- McMahon, W. W., & Boediono, W. W., 1992. Universal basic education: An overall strategy of investment priorities for economic growth. *Economics of Education Review*, 11(2), 137-151.
- Mudrajad. 2003. Dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta.
- Mulyadi Subri, 2003. Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Murni, A., 2006. Ekonomika makro. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nur F. 2014. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*.
- Nurzen, Miardi., & Riharjo, I. B., 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBanjarnegara-16-2010.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf
- Philipus, M., Hadjon 1995. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pratolo, S, & Binang Sukma Yudha. 2012. Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 144-160.
- Rahman, H. 2005. Pendapatan Asli Daerah. (<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-aslidaerah.html>).
- Ramhatullah. 2015. Pengaruh Penduduk Umur Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Visipena* Vol. 6, no 2 (2015).
- Ramlan, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Unsyiah* Vol 5, No 2: Mei 2016.
- Rasyadi, A. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
- Rochaida, Eny, 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. In *Forum Ekonomi* (Vol. 18, No. 1).
- Rostow. Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta.
- Safitri, I., & Aliasuddin, A., 2016. Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56-65.
- Sasana, H. dan Argi R. (2011). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sasana, H., 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business* Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiaji, W., & Adi, P. H., 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Sianturi, A., 2010. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/pros_2008mak3.pdf

- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited by S. M. Soares. MetaLibri Digital. Library, 2007.
- Smith, Adam. 1776. *Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta.
- Suci, Puspita A., dan Padmono, Yazid Yud. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Volume 3, Nomor 1.
- Sudadyo, H. T., 2013. *Pengaruh Faktor Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Sulastyawati, D., 2014. Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1).
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Jakarta*: PT. Bumi Aksara.
- Thomas Robert Malthus. 1798. “*Essai on Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condoret, and Other Writers.*”
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp
- Valencia, Maria W., & Handayani, N., 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11).
- Wahyudi, M. V., & Handayani, N., 2016. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11).
- Wahyuningsih, S., 2009. Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1).
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Wong, John D., 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423.